

**ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK DALAM KRISIS KEMANUSIAAN:
PERSPEKTIF ETIKA KEPEMIMPINAN ISLAM**

Badrul Helmi, Bahrul Jamil, Hasnimar, Salsabila

badrulhelmi@utnd.ac.id

Universitas Tjut Nyak Dhien

ARTICLE INFO

*Keywords: Political
Communication, Humanitarian
Crisis, Islamic Leadership,
Communication Ethics, Natural
Disasters*

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms
of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Humanitarian crises caused by natural disasters require the state to provide honest, empathetic, and responsible political communication. However, in practice, statements by government officials often demonstrate a lack of coordination and consistency between officials and even contradict the conditions of victims on the ground. This situation gives rise to a triangular conflict between disaster victims, the government, and government supporters. The most frequently debated issues are claims of the government's ability or success in handling disasters, the adequacy of aid, and the stability of the situation on the ground. This study aims to analyze the state's political communication patterns in humanitarian crises and evaluate them through the perspectives of political communication and Islamic leadership ethics. The method used is a library study by reviewing literature on political communication, crisis communication, political ethics, and Islamic teachings that discuss leadership and the responsibility of rulers to their people. Several examples of statements by public officials taken from the mass media are also included as contextual illustrations. The results show that the state's political communication in disaster situations tends to be defensive, image-oriented, and ignores transparency and empathy. From an Islamic perspective, these practices contradict the values of siddiq (honesty), amana (trustworthiness), and mas'uliyah (property), which are the foundations of leadership. In Islam, leaders are placed primarily responsible for the safety and well-being of their people by conveying accurate information and siding with the victims. In conclusion, the failure of state political communication has resulted in a decline in public trust and reflects a violation of leadership ethics.

INTRODUCTION

Bencana alam tidak hanya menghadirkan kerusakan fisik namun juga penderitaan moril dan materil yang juga menjadi ujian serius bagi Negara dalam menjalankan fungsi komunikasi politiknya. Dalam situasi krisis kemanusiaan, komunikasi politik tidak sekedar berperan sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan menjadi medium utama pembentukan kepercayaan public, legitimasi kebijakan dan peneguhan tanggung jawab moral Negara terhadap warga negaranya.

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa komunikasi politik Negara dalam konteks bencana sering kali menimbulkan problem serius. Pernyataan pejabat public yang saling bertentangan, klaim keberhasilan penanganan yang tidak sejalan dengan kondisi lapangan, serta minimnya empati dalam bahasa politik yang melahirkan jarak antara korban dan Negara atau pemerintahan. Fenomena ini memunculkan kondisi paradoks yang dapat disebut dengan “Negara bicara, korban membantah”, dimana narasi resmi Negara tidak merepresentasikan pengalaman penderitaan masyarakat terdampak.

Dalam konteks Negara dengan mayoritas penduduk muslim, komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai amanah dan tanggung jawab moral. Islam tidak hanya mengatur aspek kekuasaan, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji komunikasi politik negara dalam krisis kemanusiaan dengan menggunakan perspektif etika kepemimpinan Islam sebagai kerangka evaluatif.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai komunikasi politik dalam konteks krisis kemanusiaan telah berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tantangan global seperti konflik bersenjata, bencana alam, pengungsian massal, dan krisis sosial berkepanjangan. Komunikasi politik tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memengaruhi persepsi publik,

membangun legitimasi, serta menentukan arah respons kolektif terhadap krisis. Dalam situasi kemanusiaan yang genting, komunikasi politik memiliki peran krusial karena kesalahan pesan, manipulasi informasi, atau absennya empati dapat memperparah penderitaan masyarakat.

Literatur komunikasi politik modern banyak merujuk pada teori agenda setting, framing, dan kepemimpinan retorik dalam menjelaskan bagaimana aktor politik mengelola pesan di tengah krisis. McNair menegaskan bahwa komunikasi politik dalam kondisi darurat menuntut kredibilitas sumber, konsistensi pesan, serta kejelasan narasi agar tidak menimbulkan kepanikan publik. Penelitian lain menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif pada masa krisis tidak cukup bersifat informatif, tetapi harus mampu membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin politik berperan sebagai simbol stabilitas yang tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga makna dan harapan.

Krisis kemanusiaan sebagai konteks komunikasi politik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari komunikasi politik normal. Situasi krisis ditandai oleh ketidakpastian tinggi, tekanan emosional, serta keterbatasan informasi yang valid. Rosenthal dan Weiss menekankan bahwa komunikasi dalam krisis harus mengedepankan empati dan tanggung jawab moral, karena publik berada dalam kondisi rentan. Studi-studi komunikasi krisis menunjukkan bahwa kegagalan pemimpin dalam berkomunikasi secara jujur dan manusiawi dapat mengikis kepercayaan publik dan memicu konflik sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki dimensi etis dan spiritual yang sangat kuat. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai dominasi, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Literatur klasik Islam, seperti pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali, menempatkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat sebagai inti dari

kepemimpinan. Dalam konteks komunikasi politik, etika kepemimpinan Islam menuntut penyampaian pesan yang benar, tidak manipulatif, serta berorientasi pada perlindungan martabat manusia, khususnya kelompok rentan dalam krisis kemanusiaan.

Nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran (sidq), keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab (amanah) memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip komunikasi krisis modern. Kejujuran menjadi dasar transparansi informasi, keadilan mencegah bias dan diskriminasi dalam penyampaian pesan, sementara rahmah menuntut komunikasi yang empatik dan berorientasi pada penderitaan korban. Konsep masalah dalam Islam juga memberikan kerangka normatif bahwa komunikasi politik harus diarahkan pada kepentingan umum, bukan sekadar pencitraan politik atau kepentingan kekuasaan.

Beberapa studi empiris tentang kepemimpinan etis menunjukkan bahwa komunikasi yang berlandaskan nilai moral mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan sosial. Brown dan Treviño menegaskan bahwa kepemimpinan etis berkontribusi pada legitimasi dan stabilitas sosial, terutama dalam situasi krisis. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berangkat dari perspektif etika universal atau Barat, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan nilai-nilai Islam. Penelitian yang secara eksplisit mengkaji komunikasi politik dalam krisis kemanusiaan dari perspektif etika kepemimpinan Islam masih relatif terbatas.

Kesenjangan literatur ini menunjukkan pentingnya kajian integratif yang menghubungkan teori komunikasi politik modern dengan prinsip-prinsip etika Islam. Selama ini, kajian etika kepemimpinan Islam lebih banyak bersifat normatif-teologis, sementara studi komunikasi politik cenderung bersifat empiris dan sekuler. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim atau negara dengan basis nilai keislaman yang kuat, komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan religius yang hidup dalam kesadaran publik.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis komunikasi politik dalam krisis kemanusiaan melalui perspektif etika kepemimpinan Islam

menawarkan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian komunikasi politik dengan dimensi etika religius, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk menilai praktik komunikasi pemimpin dalam situasi krisis secara lebih manusiawi, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan analisis empiris yang menguji bagaimana nilai-nilai etika Islam diimplementasikan dalam komunikasi politik pemimpin saat menghadapi krisis kemanusiaan.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi buku dan jurnal ilmiah tentang komunikasi politik, komunikasi krisis, dan etika politik, serta literatur keislaman yang membahas kepemimpinan, amanah, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis konseptual dan normative (Sugiyono, 2018).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan konsep komunikasi politik dalam situasi krisis, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menilai praktik komunikasi politik tersebut berdasarkan nilai-nilai etika kepemimpinan Islam. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji aktor atau peristiwa tertentu, melainkan menganalisis pola komunikasi politik secara umum dalam konteks krisis kemanusiaan.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Komunikasi Politik

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan relasi antara negara dengan warga negara. McNair mendefinisikan komunikasi politik sebagai interaksi simbolik antara aktor politik, media, dan publik yang bertujuan membentuk persepsi, legitimasi, dan dukungan terhadap kebijakan atau kekuasaan tertentu (Rohmah & Wirawijaya, 2025). Dalam konteks normal, komunikasi politik

berfungsi untuk menjelaskan kebijakan, membangun citra kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik.

Namun, dalam situasi krisis kemanusiaan seperti bencana alam, konflik sosial, atau pandemi, fungsi komunikasi politik mengalami pergeseran yang signifikan. Komunikasi tidak lagi sekadar instrumen persuasi atau pencitraan, melainkan menjadi sarana vital penyelamatan manusia, pemenuhan hak publik atas informasi, serta peneguhan tanggung jawab negara terhadap warga yang terdampak. Oleh karena itu, komunikasi politik dalam krisis memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan komunikasi politik dalam situasi normal.

Teori komunikasi krisis menjelaskan bahwa pada kondisi darurat, publik berada dalam situasi ketidakpastian, kecemasan, dan kerentanan tinggi. Coombs menegaskan bahwa komunikasi krisis menuntut kecepatan, kejelasan, dan kejujuran informasi, karena kesalahan komunikasi dapat memperburuk dampak krisis itu sendiri (Sari et al., 2024). Dalam konteks ini, komunikasi politik negara berfungsi sebagai sumber Informasi utama yang menentukan arah respons publik, tingkat kepatuhan masyarakat, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, komunikasi politik dalam krisis kemanusiaan memiliki dimensi moral dan etis yang kuat (Zaenal Fanani & Bando, 2018). Negara tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga untuk menggunakan bahasa yang empatik dan berpihak pada korban.

Ulmer, Sellnow, dan Seeger menyatakan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus mengedepankan kepedulian terhadap penderitaan korban, bukan semata-mata melindungi reputasi institusi (Suharyanti & Sutawidjaya, 2010). Dengan demikian, komunikasi politik dalam krisis kemanusiaan merupakan

kombinasi antara fungsi informatif, tanggung jawab etis, dan legitimasi kekuasaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, komunikasi politik juga dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama ketika keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat berada dalam ancaman (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Ketika komunikasi negara gagal memenuhi prinsip-prinsip tersebut, krisis kemanusiaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berubah menjadi krisis kepercayaan dan krisis legitimasi politik.

Tanggung Jawab Publik dan Kepentingan Politik

Meskipun secara teoritis komunikasi politik dalam krisis seharusnya berorientasi pada keselamatan dan kepentingan publik, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara tanggung jawab negara terhadap korban dan kepentingan politik elite penguasa. Dalam banyak kasus, komunikasi politik justru dipengaruhi oleh logika kekuasaan, stabilitas politik, dan pencitraan, sehingga mengaburkan realitas krisis yang dialami masyarakat terdampak.

Blumler dan Kavanagh menjelaskan bahwa komunikasi politik modern cenderung bergerak menuju apa yang disebut sebagai *politics of image* (Heryanto, 2018), di mana narasi keberhasilan, stabilitas, dan kontrol situasi lebih diutamakan daripada transparansi (Hasan, 2009). Dalam situasi krisis kemanusiaan, kecenderungan ini sering kali mendorong negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang menenangkan secara politis, tetapi tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

Akibatnya, komunikasi politik berubah menjadi alat defensif untuk menjaga legitimasi kekuasaan, bukan sarana untuk memperjuangkan kepentingan korban. Ketegangan ini tampak ketika negara lebih fokus pada klaim penanganan yang “terkendali”, “cukup”, atau “berhasil”, sementara korban masih menghadapi kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan keterbatasan akses bantuan. Coombs menyebut pola ini sebagai *reputation-oriented crisis communication*, yaitu komunikasi krisis yang lebih berorientasi pada perlindungan citra institusi dibandingkan pemulihan korban (Sari et al., 2024). Pola tersebut berpotensi menciptakan disonansi antara narasi resmi negara dan pengalaman nyata masyarakat.

Dalam konteks komunikasi politik, ketidakpekaan ini memiliki implikasi serius. Ketika publik, terutama korban bencana, merasakan ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan negara dan apa yang mereka alami, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun (Zakiyah et al., 2024). Habermas menekankan bahwa legitimasi kekuasaan modern sangat bergantung pada komunikasi yang rasional dan jujur di ruang publik (Hardiman, 2009). Ketika komunikasi kehilangan rasionalitas dan empati, legitimasi politik ikut tergerus. Lebih jauh, komunikasi krisis yang didominasi kepentingan politik dapat memperdalam ketimpangan relasi kuasa antara negara dan korban (Zakiyah et al., 2024).

Negara memiliki otoritas untuk menentukan narasi resmi, sementara korban sering kali tidak memiliki ruang yang setara untuk menyuarakan pengalaman mereka. Dalam kondisi ini, komunikasi politik tidak lagi berfungsi sebagai jembatan antara negara dan rakyat, melainkan sebagai tembok yang memisahkan realitas kekuasaan dan realitas penderitaan. Dengan demikian, komunikasi krisis dalam konteks kemanusiaan berada pada persimpangan antara dua kepentingan, yaitu tanggung jawab publik untuk melindungi dan

menyelamatkan warga negara, serta kepentingan politik untuk mempertahankan legitimasi dan citra kekuasaan. Ketika kepentingan politik lebih dominan, komunikasi politik berpotensi kehilangan dimensi kemanusiaannya dan berubah menjadi bentuk pengabaian simbolik terhadap penderitaan korban.

Narasi Negara dan Realitas Korban di Lapangan

Salah satu persoalan paling krusial dalam komunikasi politik negara pada situasi krisis kemanusiaan adalah munculnya ketidaksinkronan antara narasi resmi yang disampaikan pemerintah dan realitas yang dialami oleh korban di lapangan. Narasi negara kerap menampilkan situasi yang digambarkan sebagai terkendali, bantuan yang disebut mencukupi, serta proses penanganan yang dinilai berjalan optimal. Namun, gambaran tersebut sering kali tidak sejalan dengan pengalaman korban yang masih menghadapi keterbatasan pangan, akses kesehatan yang minim, kehilangan tempat tinggal, dan meningkatnya angka kematian.

Dalam kajian komunikasi politik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *discrepancy of narratives*, yaitu perbedaan tajam antara pesan yang diproduksi oleh elite kekuasaan dan realitas sosial yang dirasakan masyarakat (Ngaybe et al., 2024). Ketidaksinkronan ini bukan semata persoalan teknis komunikasi, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam membaca dan merepresentasikan kondisi kemanusiaan secara jujur dan utuh. Fenomena tersebut diperparah oleh struktur komunikasi politik yang bersifat hierarkis dan elitis.

Negara memiliki otoritas simbolik untuk menentukan narasi dominan melalui konferensi pers, pernyataan pejabat, dan media arus utama. Sementara itu, korban bencana berada pada posisi subordinat dengan akses terbatas untuk menyampaikan pengalaman mereka secara setara di ruang publik. Akibatnya, realitas korban sering kali tersisih atau direduksi menjadi angka statistik yang kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Dalam perspektif komunikasi krisis, ketidaksinkronan narasi ini berbahaya karena dapat memperburuk dampak krisis itu sendiri. Coombs menegaskan bahwa komunikasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan berpotensi memicu kebingungan, kemarahan publik, dan hilangnya kepercayaan terhadap otoritas (Sari et al., 2024). Ketika korban merasa bahwa penderitaan mereka tidak diakui atau bahkan disangkal secara simbolik melalui bahasa negara, maka krisis kemanusiaan berubah menjadi krisis legitimasi politik. Lebih jauh, ketidaksinkronan antara narasi negara dan realitas korban menunjukkan adanya kecenderungan komunikasi politik yang berorientasi pada stabilitas citra dan pengendalian opini publik, bukan pada pemenuhan kebutuhan korban.

Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban negara, melainkan sebagai alat untuk menjaga wibawa kekuasaan. Kritik terhadap kondisi ini menjadi penting, karena tanpa komunikasi yang selaras dengan realitas lapangan, kebijakan penanganan krisis berisiko kehilangan efektivitas dan legitimasi sosial.

Fenomena “Negara Bicara, Korban Membantah” dalam Krisis Kemanusiaan

Ketidaksinkronan narasi negara dan realitas korban melahirkan fenomena yang dapat dirumuskan sebagai “negara bicara, korban membantah”. Fenomena ini menggambarkan situasi ketika negara secara aktif memproduksi klaim,

pernyataan, dan narasi resmi mengenai keberhasilan penanganan krisis, sementara korban, baik melalui pengalaman langsung maupun ruang komunikasi alternative, menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Bantahan korban tidak selalu disampaikan dalam bentuk pernyataan formal, melainkan melalui kesaksian, keluhan, dan ekspresi penderitaan yang muncul di berbagai ruang sosial.

Dalam kajian komunikasi politik, fenomena ini menunjukkan terjadinya kegagalan komunikasi dua arah antara negara dan warga. Komunikasi politik yang seharusnya bersifat dialogis berubah menjadi monolog kekuasaan, di mana negara berbicara dari posisi otoritatif tanpa membuka ruang koreksi dari korban.

Habermas menyebut kondisi ini sebagai distorsi komunikasi di ruang publik, ketika rasionalitas komunikatif digantikan oleh kepentingan strategis kekuasaan (Hardiman, 2009). Fenomena “negara bicara, korban membantah” juga mencerminkan adanya konflik makna dalam memaknai krisis kemanusiaan (Zakiyah et al., 2024). Bagi negara, krisis sering dipersepsikan sebagai masalah administratif dan politis yang harus segera dikendalikan narasinya. Sementara bagi korban, krisis adalah pengalaman hidup yang menyangkut keselamatan, martabat, dan kelangsungan hidup. Ketika dua perspektif ini tidak dipertemukan melalui komunikasi yang empatik dan jujur, maka bahasa negara cenderung terasa dingin, abstrak, dan tidak manusiawi di mata korban.

Ulmer, Sellnow, dan Seeger menekankan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus memprioritaskan suara korban sebagai pusat narasi (Faustyna &

Rudianto, n.d.). Namun, dalam praktik komunikasi politik, suara korban sering kali diposisikan sebagai gangguan terhadap narasi stabilitas yang ingin dibangun Negara (Rakhmaniar, 2024).

Akibatnya, bantahan korban tidak dipandang sebagai masukan penting, melainkan sebagai ancaman terhadap citra pemerintah. Pola ini memperdalam jurang emosional dan sosial antara negara dan masyarakat terdampak. Fenomena ini memiliki implikasi serius bagi hubungan negara dan warga negara. Ketika korban merasa tidak didengar, tidak dipercaya, atau tidak diakui penderitaannya, maka komunikasi politik kehilangan fungsi kemanusiaannya.

Negara yang terus berbicara tanpa mendengarkan bantahan korban berisiko mengalami delegitimasi moral, karena kekuasaan tidak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan sebagai entitas yang menjauh dari penderitaan rakyatnya (Zakiyah et al., 2024). Dengan demikian, fenomena “negara bicara, korban membantah” bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi merupakan indikator krisis etika dan tanggung jawab politik negara dalam situasi kemanusiaan.

Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak dipahami semata sebagai kekuasaan administratif atau otoritas politik, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Konsep amanah menempatkan pemimpin sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola urusan publik demi kemaslahatan bersama, terutama dalam situasi genting seperti krisis kemanusiaan.

Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah harus ditunaikan kepada yang berhak dan dijalankan dengan adil (Q.S. an-Nisā': 58).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"* (Q.S. an-Nisā': 58) (Al-Qur'an, 2019).

Amanah dalam kepemimpinan Islam tidak berhenti pada aspek pengambilan kebijakan, tetapi juga mencakup cara pemimpin berkomunikasi dengan rakyatnya. Bahasa, narasi, dan pernyataan publik pemimpin merupakan bagian dari pertanggungjawaban amanah tersebut. Dalam konteks krisis kemanusiaan, komunikasi politik menjadi sarana utama pemimpin untuk menunjukkan keberpihakan, empati, serta keseriusan dalam melindungi kelompok rentan.

Oleh karena itu, kegagalan komunikasi bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi dapat dipandang sebagai kegagalan menjalankan amanah kepemimpinan. Islam juga menekankan konsep mas'uliyah (tanggung jawab), sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim) (Enc, 2024).

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab bukan hanya atas hasil kebijakan, tetapi juga atas dampak sosial dan psikologis dari tindakan serta ucapannya. Dalam situasi krisis, pernyataan yang meremehkan penderitaan korban atau tidak sesuai dengan realitas lapangan dapat memperparah luka sosial dan mencederai kepercayaan publik. Dengan demikian, kepemimpinan dalam perspektif Islam menuntut adanya sensitivitas sosial yang tinggi.

Pemimpin tidak boleh terjebak pada kepentingan pencitraan atau stabilitas politik semata, melainkan harus memprioritaskan keselamatan, martabat, dan suara korban. Amanah dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi etik yang menuntut pemimpin untuk menghadirkan komunikasi politik yang jujur, empatik, dan berpihak kepada penderitaan rakyat. Dalam konteks inilah, Islam memberikan kerangka normatif yang relevan untuk mengkritisi praktik komunikasi politik negara dalam krisis kemanusiaan.

Prinsip Siddiq dan Qaulan Sadidan Sebagai Etika Komunikasi Pemimpin

Salah satu prinsip utama dalam etika komunikasi Islam adalah *ṣidq* (kejujuran). *Ṣidq* tidak hanya dimaknai sebagai berkata benar, tetapi juga sebagai keselarasan antara ucapan, niat, dan realitas. Al-Qur'an memerintahkan orang-orang beriman untuk berkata benar dan bersama orang-orang yang jujur (Q.S. at-Taubah: 119).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bergabunglah kamu bersama dengan orang-orang yang benar"* (Al-Qur'an, 2019).

Dalam konteks kepemimpinan, prinsip *ṣidq* menuntut pemimpin untuk menyampaikan informasi secara apa adanya, tanpa manipulasi, distorsi, atau

pengaburan fakta, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan. Prinsip *siddiq* ini diperkuat dengan konsep qaulan sadīdan, yaitu perkataan yang lurus, tepat, dan bertanggung jawab (Q.S. al-Aḥzāb: 70).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung” (Al-Qur’an, 2019).

Qaulan Sadidan tidak hanya menekankan kebenaran isi pesan, tetapi juga ketepatan konteks dan dampak sosial dari ucapan tersebut (Nur et al., 2024). Dalam komunikasi politik, qaulan sadīdan menuntut pemimpin untuk mempertimbangkan bagaimana pernyataan mereka diterima oleh korban, apakah membawa ketenangan, harapan, dan keadilan, atau justru melukai dan menyingkirkan pengalaman penderitaan rakyat. Jika dikaitkan dengan fenomena “negara bicara, korban membantah”, kegagalan menerapkan prinsip *siddiq* dan *qaulan sadīdan* terlihat ketika narasi resmi negara tidak selaras dengan realitas korban di lapangan (Razali & Asha’ari, 2025).

Pernyataan yang defensif, normatif, atau berorientasi pencitraan dapat dianggap melanggar etika komunikasi Islam karena mengabaikan kebenaran substantif dan suara korban (Azhar, 2017). Dalam perspektif Islam, komunikasi semacam ini tidak hanya bermasalah secara politis, tetapi juga bermasalah secara moral. Lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa ucapan pemimpin memiliki konsekuensi etis dan sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa lisan

adalah cermin hati dan sarana utama dalam menegakkan atau merusak keadilan sosial (Mahadhir, 2019).

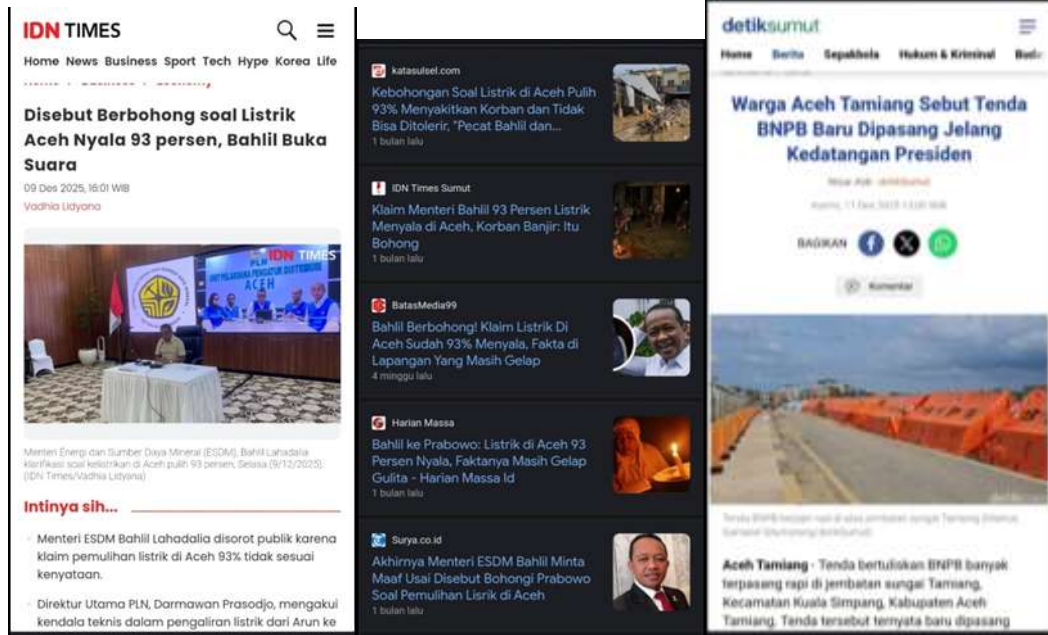
Transkrip Pernyataan Pejabat Negara terkait Penanganan Krisis Kemanusiaan dan kebohongan yang disampaikan



Gambar 1. BNPB mengatakan bencana tidak mencekam seperti di sosmed

Gambar 2. Prabowo menolak bantuan asing, tapi menyebut terbuka terhadap bantuan publik

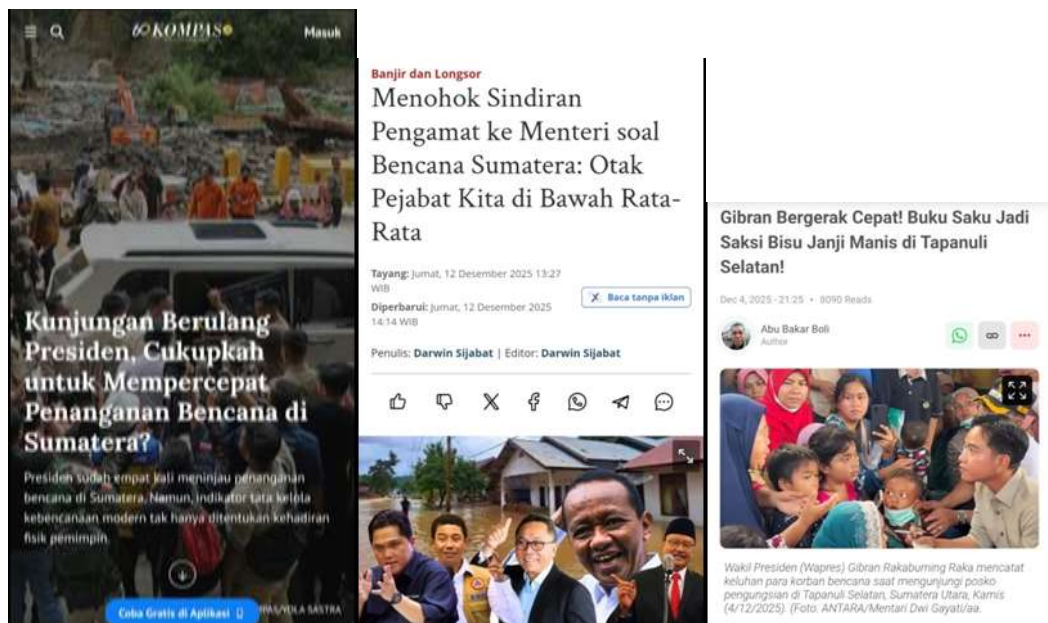
Gambar 3. Prabowo merasa mampu menangani bencana sendirian



Gambar 4. Bahil mengatakan bahwa listrik menyala 98% padahal hanya menyala saat kunjungan presiden saja

Gambar 5. Berita terkait kebohongan bahil terkait listrik yang menyala padahal hanya pencitraan kepada presiden

Gambar 6. Tenda BNPB di pasang menjelang kedatangan presiden dengan dalih lokasi tidak bisa di jangkau



Gambar 7. Presiden berkunjung tapi kondisi tidak me mbaik

Gambar 8. Pengamat menyayangkan state ment buruk dari para pejabat

Gambar 9. Wapres turun ke lokasi bencana tanpa membawa bantuan

Pemberitaan Media Nasional dan Internasional tentang Kondisi Lapangan



Gambar 10. Laporan berita Aljazeera



Gambar 11. Laporan berita CnA



Gambar 12. Laporan berita abc News

Ilustrasi Respons Publik terhadap Narasi Negara di Media Sosial



Gambar 13. Komenta masyarakat melihat statement pejabat terkait dana TNI



Gambar 14. Komenta masyarakat terkait pesawat yang "katanya" diturunkan taxi tidak ada



Gambar 15. Masyarakat membandingkan tanggapan pejabat antar satu bencana dengan bencana lain

Oleh karena itu, komunikasi pemimpin dalam krisis kemanusiaan seharusnya menjadi alat perlindungan moral bagi korban, bukan instrumen pembelaan diri kekuasaan. Ketika prinsip *sidq* dan *qaulan sadīdan* diabaikan, komunikasi politik berpotensi berubah menjadi bentuk kekerasan simbolik yang memperdalam penderitaan korban.

Dengan demikian, prinsip *siddiq* dan *qaulan sadīdan* memberikan landasan etika Islam yang sangat relevan untuk menilai praktik komunikasi politik Negara (Razali & Asha'ari, 2025). Etika ini menuntut pemimpin untuk menghadirkan komunikasi yang jujur, lurus, dan berpihak pada kebenaran sosial, sehingga komunikasi politik tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan kajian konseptual, kritik sosial, dan analisis perspektif etika kepemimpinan Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik negara dalam situasi krisis kemanusiaan belum sepenuhnya dijalankan sebagai instrumen tanggung jawab publik. Komunikasi yang seharusnya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang jujur, empatik, dan menenangkan justru kerap tampil dalam bentuk narasi defensif, elitis, dan berorientasi pencitraan politik.

Ketidaksinkronan antara pernyataan pejabat negara dan realitas korban di lapangan melahirkan fenomena yang dalam penelitian ini disebut sebagai “negara bicara, korban membantah”. Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pusat kekuasaan dan pengalaman penderitaan masyarakat terdampak bencana. Jarak ini tidak hanya memperlemah

kepercayaan publik terhadap negara, tetapi juga memperparah luka sosial dan psikologis korban yang merasa suara dan penderitaannya tidak diakui.

Dalam perspektif Islam, praktik komunikasi politik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika kepemimpinan, khususnya nilai amanah, mas'uliyah, *ṣidq*, dan *qaulan ṣadīdan*. Islam menempatkan pemimpin sebagai penanggung jawab utama atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam cara menyampaikan informasi publik. Ketika komunikasi politik mengabaikan kejujuran dan empati, maka hal tersebut tidak hanya merupakan kegagalan teknis komunikasi, tetapi juga pelanggaran etika kepemimpinan yang memiliki konsekuensi moral dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa krisis kemanusiaan sejatinya merupakan ujian moral bagi kepemimpinan politik. Reorientasi komunikasi politik berbasis nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak agar negara mampu menghadirkan komunikasi yang adil, humanis, dan berpihak pada korban. Integrasi antara teori komunikasi politik dan etika kepemimpinan Islam diharapkan dapat menjadi kerangka normatif sekaligus kritis dalam membangun model komunikasi politik krisis yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

REFERENCES

- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). *Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 7(2), 431–443.
- Azhar, A. A. (2017). Politik Pencitraan Dalam Perspektif Komunikasi Islam. *Analytica Islamica*, 6(2), 135–146.
- Enc, H. (2024). *Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi*. Hadeethenc.Com. <https://Hadeethenc.Com/Id/Home#Categories>

- Faustyna, & Rudianto. (N.D.). *Strategi Komunikasi Krisis: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Dan Solusi*. Umsu Press.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" Dan "Ruang Publik" Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Penerbit Pt Kanisius.
- Hasan, K. (2009). *Komunikasi Politik Dan Pecitraan*. 2(4), 22–43.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media Di Panggung Politik*. Ircisod.
- Mahadhir, M. S. (2019). Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(1), 73–86.
<https://doi.org/10.48094/Raudhah.V4i1.43>
- Ngaybe, M. G. B., Sierra, L. A., McNair, A., & Gonzalez, M. (2024). *Proceedings From A Multidisciplinary Workshop Defining The Scope Of Resilience Informatics In Public Health : A Qualitative Analysis Table Of Contents*.
- Nur, A., Sukmaningtyas, I., Nurrohim, A., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). *Etika Komunikasi Al-Qur ' An Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern*. 4.
- Rakhmaniar, A. (2024). *Komunikasi Krisis Dalam Organisasi : Analisis Naratif Tentang Pengelolaan Konflik Internal*. 2.
- Razali, N. A. W., & Asha'ari, M. F. (2025). *Kerangka Konsep Tika Pengucapan Politik Berdasarkan Nilai Al-Qur'an Dan Maqasid Al-Shariah*. 17(1), 67–88.
- Rohmah, S., & Wirawijaya. (2025). *Komunikasi Poltik 5.0*. Eureka Media Aksara.
- Sari, W. P., Putriana, M., & Firdaus, R. (2024). *Pengelolaan Krisis Publik Relation*. Anggota Ikapi.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (I)*. Alfabeta.

- Suharyanti, & Sutawidjaya, A. H. (2010). *Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis Dan*. 165–185.
- Zaenal Fanani, & Bandono, A. (2018). *Ketahanan Nasional, Regional Dan Global*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zakiah, Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. . (2024). *Diskursus Publik Dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas*. 3(2). <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i2.807>